

ABSTRAK

Keamanan Energi di Indonesia memasuki masa kritis saat ini. Permasalahan energi yang mengganggu keamanan energi nasional adalah cadangan energi khususnya energi fosil yang semakin menipis, harga bahan bakar minyak yang tidak stabil karena sering mengalami naik turun, dan elektrifikasi nasional yang belum merata, ketiga hal tersebut mengindikasikan bahwa keamanan energi di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menaggulangi permasalahan keamanan energi yang terjadi di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan SBY adalah PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). KEN dijalankan melalui dua arah kebijakan yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Kebijakan utama terdiri dari 4 kebijakan yaitu kebijakan ketersediaan energi, kebijakan prioritas pengelolaan energi, kebijakan pemanfaatan sumber daya energi, dan kebijakan cadangan energi nasional. Sedangkan kebijakan pendukung terdiri dari 6 kebijakan yaitu kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, kebijakan lingkungan dan keselamatan, kebijakan harga, subsidi dan insentif energi, kebijakan infrastruktur dan akses masyarakat industri energi, kebijakan penelitian dan pengembangan energi, dan kebijakan kelembagaan.

Kata kunci: Keamanan Energi, Cadangan Energi, BBM, Elektrifikasi Nasional, Kebijakan Energi Nasional, Kebijakan Utama, Kebijakan Pendukung

INDONESIAN ENERGY SECURITY POLICY

AT THE ERA OF SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014

ABSTRACT

Energy security in Indonesia is entering a critical period now. The problems of energy that disrupt national energy security consist of energy reserves, especially fossil energy are dwindling, fuel prices are unstable, often increased and decreased, and the unequally national electrification. These three things indicate that energy security in Indonesia is dire straits situation. In response to this, the government of Susilo Bambang Yudhoyono issued several policies to tackle the problem. Policies issued by the government of SBY set out in the Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 about National Energy Policy (Kebijakan Energi Nasional/KEN). KEN run through two-way policy and be both the main policy and supporting policy. The main policy that consists of four policies is the availability of energy policy, energy management priority policy, policy on the use of energy resources, and policies of national energy reserves. While supporting policies consist of six policies, namely conservation and diversification of energy policy, environmental policy and safety, pricing policies, subsidies and incentives of energy, infrastructure and public access policy of the energy industry, energy research and development policy, and institutional policies.

Keywords: Energy Security, Energy Reserves, fuel-oil, National Electrification, National Energy Policy, the main policy, supporting policy